

ABSTRAK

Yasrianti Hamka.2021 Koordinasi Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Poros Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,(Dibimbing oleh Abd. Kadir Adys, SH, MM dan Handam, S.IP, M.Si).

Penelitian tentang koordinasi penertiban pedagang kaki lima ini mempunyai rumusan masalah (i) Bagaimana koordinasi Dinas perindustrian dan perdagangan dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang kaki lima di Jalan poros Pallangga di kecamatan pallangga kabupaten gowa? (ii) Faktor apa yang dapat mempengaruhi koordinasi Dinas perindustrian dan perdagangan dengan Satpol PP dalam penertiban Pedagang kaki lima di Jalan poros pallangga di kecamatan pallangga kabupaten gowa. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif ditunjang dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi dari hasil foto dan arsip pemerintahan setempat. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian adalah Koordinasi dinas Perindustrian dengan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Poros Pallangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini menaungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Satpol PP berusaha mengatasi permasalahan ketidakteraturan pedagang kaki lima dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum dilaksanakan penataan, penertiban dan pembinaan serta pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat yang sudah dilarang beraktifitas dan memindahkan para pedagang kaki lima ketempat relokasi yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya pedagang kaki lima kembali berjualan di bahu jalan dan trotoar, karena pedagang kaki lima beranggapan akan lebih mudah dijangkau oleh pembeli dan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan perangkat hukum belum tersedia. Sedangkan faktor eksternal meliputi tingkat kesadaran pedagang kaki lima masih kurang dan tingkat koordinasi antar lintas sektoral kurang mendapat dukungan.

Kata Kunci: Koordinasi, Satpol PP, PKL